

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Oleh

TANIYA DINDA AGNESYA HUTASOIT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Lampung, serta peran, fungsi, kewenangan PKBM, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan PKBM. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada narasumber kunci, meliputi pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BPMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pendidikan nonformal yang sah, berkualitas, dan inklusif melalui regulasi, pendanaan, fasilitas, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan yang akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan peraturan terkait BOP Kesetaraan. PKBM berfungsi sebagai instrumen strategis negara dalam menyediakan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan hidup, serta pemberdayaan masyarakat bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal, dengan layanan yang fleksibel, inklusif, dan sesuai kebutuhan lokal. meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sarana prasarana secara aktif, terdapat kendala implementatif seperti keterlambatan pencairan dana, pembatasan usia peserta, koordinasi yang kurang optimal, serta kasus penyalahgunaan dana, yang menimbulkan celah hukum dan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia. Kasus penyalahgunaan BOP Kesetaraan oleh oknum pengurus PKBM, yang menunjukkan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan kewajiban negara dalam hukum publik. Secara hukum, temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi administratif, serta penerapan kebijakan yang inklusif agar pemenuhan hak atas pendidikan melalui PKBM dapat terlaksana secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip hukum pendidikan serta hak asasi manusia.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

ABSTACT

GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE PUBLIC'S RIGHT TO EDUCATION THROUGH COMMUNITY LEARNING CENTERS (PKBM)

By

TANIYA DINDA AGNESYA HUTASOIT

This study aims to analyze the form of government responsibility in fulfilling the community's right to education through the implementation of non-formal education at the Community Learning Activity Center (PKBM) in Lampung Province, as well as the role, function, authority of PKBM, and the implementation of local government policies in supporting the sustainability and quality of PKBM services. The research methods used are normative legal research and empirical law. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation of key informants, including PKBM managers, the Provincial Education Office, and BPMP. The results of the study indicate that the government has a legal obligation to provide legitimate, quality, and inclusive non-formal education through regulations, funding, facilities, teacher development, and accountable supervision, as regulated in Article 31 of the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas), and regulations related to the Equivalency BOP. PKBM functions as a strategic instrument of the state in providing equivalency education, literacy, life skills, and community empowerment for citizens who are not accessible to formal education, with services that are flexible, inclusive, and tailored to local needs. Although local governments have actively carried out the functions of facilitation, guidance, supervision, and provision of infrastructure, there are implementation obstacles such as delays in disbursement of funds, age restrictions on participants, less than optimal coordination, and cases of misuse of funds, which create legal loopholes and potential violations of the principles of accountability and human rights. The case of misuse of the Equality BOP by certain PKBM administrators, which shows the potential violation of the principles of accountability and state obligations under public law. Legally, this finding emphasizes the need to strengthen oversight mechanisms, improve administrative coordination, and implement inclusive policies so that the fulfillment of the right to education through PKBM can be implemented fairly, sustainably, and in accordance with the principles of education law and human rights.

Keywords: *State Responsibility, Right to Education, Community Learning Center*